KLIPPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 25 Januari 2019

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo (Halaman, 17)	Jumat, 25 Januari 2019	Pusat dan DKI Sepakat Tunda Proyek Tanggul Laut Raksasa	Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepalat menunda pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) bagian luar.
2	Koran Tempo (Halaman, 18)	Jumat, 25 Januari 2019	Pembangunan Tanggul Pantai Jakarta Berlanjut	Pemerintah DKI berjanji segera memperbaiki tanggul yang rembes air
3	Media Indonesia (Halaman, 18)	Jumat, 25 Januari 2019	Cilacap Wakili Kota Tangguh Bencana RI	Mitigasi dibuat untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak bencana. Tujuan tersebut harus diimbangi dengan sumber daya yang sepadan.
4	Kompas (Halaman, 14)	Jumat, 25 Januari 2019	Optimalkan Infrastruktur	Selama kurun 2016-2018, sebanyak 62 proyek strategis nasional senilai Rp 320 triliun telah selesai. Keberadaanya mesti dimanfaatkan secara optimal.
5	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 25 Januari 2019	Kawasan Industri Makin Menyebar	Pengoperasian jalan tol Trans – Jawa dari Merak, Banten sampai dengan Grati, Jawa Timur dinilai bakal memicu penyebaran kawasan industri dan tidak lagi terfokus di Jawa bagian Barat.
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 25 Januari 2019	Berita Foto	Rencana Tol Semarang-Demak.
7	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 25 Januari 2019	*Groundbreaking* Ditargetkan Maret	PDAM Tirta Moedal menargetkan peletakan batu pertama proyek Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat pada Maret 2019
8	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 25 Januari 2019	WFF Tawarkan Skema Pembiayaan	Lembaga keuangan berbasis di Amsterdam, belanda, The Water Finance Facility menawarkan skema pendanaan baru untuk membiayai proyek-proyek air minum di Indonesia.
9	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Jumat, 25 Januari 2019	Jabar Percepat Tol Japek Selatan	Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya percepatan pembangunan proyek jalan tol Japek Selatan dengan menuntaskan permasalahan penting
10	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Jumat, 25 Januari 2019	Berita Foto	Kondisi Bendungan Bili-Bili

Judul	**Pusat dan DKI Sepakat Tunda Proyek Tanggul Laut Raksasa**	Tanggal	Jumat, 25 Januari 2019
Media	Koran Tempo (Halaman, 17)		
Resume	Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepalat menunda pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) bagian luar.		

Pusat dan DKI Sepakat Tunda Proyek Tanggul Laut Raksasa

Kelanjutan proyek masih dikaji Bappenas.

Inge Klara Safitri
inge.klara@tempo.co.id

DOK. TEMPO/FAKHRI HERMANSYAH

Proyek pembangunan tanggul pengaman pantai di kawasan Muara Baru, Jakarta, 28 Desember 2017.

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat menunda pembangunan tanggul laut raksasa (*giant sea wall*) bagian luar.

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeldjono mengatakan Kementerian telah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ihwal penghentian rencana megaproyek di Teluk Jakarta itu.

Menurut Basoeki, dalam diskusi itu, Anies meminta pembangunan *giant sea wall* bagian luar dikaji ulang. Basoeki pun telah menjelaskan bahwa proyek bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) itu tak hanya untuk menangkal banjir, tapi juga pemulihan lingkungan (*environmental remedies*). "Hasil diskusi sudah satu suara. Alhamdulillah," kata Basoeki di Istana Wakil Presiden, kemarin.

Tak hanya itu, kata Basoeki, megaproyek NCICD bisa mendukung rencana pemerintah DKI untuk mengurangi penggunaan air tanah dan mengontrol penurunan tanah. Meski begitu, kelanjutan proyek tersebut masih terus dikaji Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). "Nanti (kelanjutannya) tergantung perkembangan penurunan tanah," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menilai proyek pembangunan tanggul laut raksasa di utara Jakarta harus dikaji ulang. Sebab, kondisi geografis Ibu Kota berbeda dari daerah lain. Apalagi, kata dia, banyak studi yang menyatakan pembangunan tanggul laut hanya akan menampung sampah 13 aliran sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan bisa merusak ekosistem di sana.

Menurut Anies, yang dibutuhkan Jakarta adalah tanggul pantai untuk mencegah banjir rob. Pemerintah DKI pun terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan tanggul pantai karena ancaman banjir rob terus membayangi wilayah Jakarta Utara. "Kami koordinasi dengan pusat. Sebab, tanggul raksasa akan dibangun pusat," ucapnya.

Peneliti bidang oseanografi dari Badan Penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan, Widodo Pranowo, menuturkan, berdasarkan penelitian instansinya, Teluk Jakarta tak memerlukan tanggul di bagian lepas pantai. Tanggul lepas pantai justru akan menghambat sirkulasi air laut, yang diperlukan 13 muara sungai di Teluk Jakarta.

Jika tanggul lepas pantai tetap dibangun, kata Widodo, seluruh material dari 13 sungai akan terakumulasi di dalam basin atau kolam tanggul Teluk Jakarta. "Akan sangat berbahaya bila yang terakumulasi adalah sampah organik dan sampah-sampah lainnya," tuturnya. "Itu bisa membusuk dan menyebabkan kematian ikan massal."

Akumulasi material di dalam basin tanggul itu, Widodo menambahkan, juga dikhawatirkan akan mengganggu air laut yang dijadikan pendingin Pembangkit Listrik Tenaga Uap Muara Karang. "Yang dikhawatirkan akan mengganggu produksi listrik," kata dia.

Proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (NCICD) sedianya akan digarap Kementerian PUPR bekerja sama dengan berbagai pihak. Proyek ini rencananya dikerjakan dalam tiga tahap. Pertama, tahap penguatan sistem tanggul laut dan sungai yang sudah ada. Kedua, tahap konstruksi tanggul laut lepas di pantai bagian barat Teluk Jakarta. Ketiga, pembangunan tanggul laut lepas pantai di timur Teluk Jakarta.

● VINDRY FLORENTIN

Judul	**Pembangunan Tanggul Pantai Jakarta Berlanjut**	Tanggal	Jumat, 25 Januari 2019
Media	Koran Tempo (Halaman, 18)		
Resume	Pemerintah DKI berjanji segera memperbaiki tanggul yang rembes air		

TEMPO/TONY HARTAWAN

Proyek tanggul raksasa atau *giant sea wall* di Pluit, Jakarta.

Pembangunan Tanggul Pantai Jakarta Berlanjut

Pemerintah DKI berjanji segera memperbaiki tanggul yang rembes air laut.

Inge Klara Safitri
inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA — Pembangunan tanggul laut bagian dalam atau tanggul pantai di Teluk Jakarta tetap berjalan meski pembangunan tanggul raksasa (*giant sea wall*) bagian luar ditunda. Sebab, tanggul pantai dibutuhkan untuk menangkal banjir rob di kawasan pesisir utara Jakarta.

Kepala Dinas Tata Air DKI, Teguh Hendrawan, mengatakan pembangunan tanggul pantai tahap pertama sudah hampir rampung. Dari tiga lokasi, hanya satu lokasi yang pembangunannya menghadapi kendala, yakni di Kamal Muara Baru.

"Di Pasar Ikan sudah 100 persen rampung, Kali Blencong juga sudah tahap *finishing*," kata Teguh, kemarin. Adapun di area yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan tanggul telah rampung sepanjang 4,5 kilometer.

Meski begitu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik pembangunan tanggul pantai di Muara Baru, Jakarta Utara, itu. Sebab, menurut dia, tanggul tersebut kerap mengalami kebocoran. Kebocoran terakhir terjadi pada Desember lalu. "Saya lihat di lapangan salah satu masalahnya tidak berbicara dengan warga. Main patok *aja* pasang di situ," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Anies menjelaskan, sebelum dibangun tanggul, lokasi tersebut merupakan tempat parkir kapal dan pembuangan air warga. Tanggul yang dibangun pun lebih tinggi dibandingkan dengan kampung nelayan di lokasi itu. Perbedaan ketinggian itu, kata Anies, menjadi salah satu tanda penurunan permukaan tanah di Jakarta. "Itu menggambarkan tanah yang turun, tapi tanggulnya sendiri tetap," ucapnya.

Pembangunan tanggul pantai tahap pertama sudah hampir rampung. Dari tiga lokasi, hanya satu lokasi yang pembangunannya terganjal, yakni di Kamal Muara Baru.

Dari pantauan *Tempo*, tanggul di Muara Baru terdiri atas tanggul lama dan baru. Tanggul baru yang dibuat Kementerian PUPR menjorok sekitar 200 meter ke arah laut dari tanggul lama. Air laut masih merembes di tiga titik tanggul lama yang membasahi jalanan.

Wali Kota Jakarta Utara Syamsudin Lologau mengatakan akan ada perbaikan atas tanggul laut di kawasan Muara Baru yang masih rembes air. "Akan ada lanjutan pembangunan untuk diselesaikan supaya masyarakat tenang di sana," tuturnya, dua hari lalu.

Syamsudin merujuk titik rembesan air di tanggul yang berada di wilayah RW 020 RT 17 Muara Baru, Jakarta Utara. Menurut dia, perbaikan akan disesuaikan dengan kondisi tanggul. "Disesuaikan dengan yang sekarang."

Ihwal siapa yang akan memperbaiki tanggul, apakah Kementerian PUPR atau pemerintah DKI, Syamsudin tidak menjelaskannya lebih detail. "Nanti kita liat porsinya," kata dia.

Ketua RW 020 Muara Baru, Nur Rohman, mengatakan air biasanya merembes di tanggul saat laut pasang. Volume air rembesan bergantung pada ketinggian air laut. "Kalau air sejajar dengan tinggi tanggul yang lama, airnya bisa banyak," ujarnya.

Menurut Nur, air dari tanggul lama masih merembes karena tidak ada pondasi tiang pancang. Tanggul lama hanya terbuat dari bronjong atau kotak yang terbuat dari anyaman kawat baja berlapis seng yang diisi batu-batu. Bronjong biasanya dipasang di tebing untuk mencegah erosi. "Mungkin kurang rapat," ucapnya.

● M. YUSUF MANURUNG

Tanggul Laut Raksasa Itu

MEGAPROYEK National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) merupakan pengembangan terpadu dari proyek *giant sea wall* di Teluk Jakarta. Rencananya, proyek ini tak hanya membangun tanggul, tapi juga mengaitkan dengan pengembangan kawasan dan wilayah. Contoh pemanfaatan terpadunya adalah membangun jalur kereta api, jalan tol, atau perumahan nelayan di atas tanggul itu.

Masterplan Megaproyek NCICD

- **Status:** Dalam kajian
- **Tujuan:** Melindungi Ibu Kota dari banjir yang berasal dari laut. Area di bagian dalam dinding tanggul akan dimanfaatkan untuk menampung air dari 13 sungai yang melintasi Jakarta (tempat penampungan air yang dilengkapi dengan pompa raksasa).
- **Estimasi waktu pembangunan:** 10-15 tahun
- **Nilai proyek:** Rp 600 triliun
- **Panjang tanggul:** 32 kilometer (dari kota Tangerang di sisi barat Jakarta ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta)

Tiga fase rencana pembangunan:

1. Tahap D (darurat)
   - Pembangunan tanggul pesisir pantai
   - Penguatan dan peninggian tanggul pantai
   - Pembangunan tanggul muara sungai sepanjang 20 kilometer
2. Tahap M (menengah)
3. Tahap O (optimal)

Proyek Tanggul Pantai Tahap Darurat

- **Target rampung:** 2020
- **Lokasi:**
  - Kamal Muara
  - Pasar Ikan
  - Kali Blencong Marunda
- **Pembagian proyek:**
  - Kementerian PUPR: 7,2 kilometer
  - Pengembang: 10,4 kilometer
  - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: 2,4 kilometer
- Total: 20 kilometer

Kemajuan pembangunan:

- **Kementerian PUPR:**
  - Muara Baru: 2,3 kilometer
    Kontraktor: PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya KSO
    Nilai kontrak: Rp379 miliar
  - Kali Baru: 2,2 kilometer dan dilengkapi dengan bangunan rumah pompa
    Kontraktor: PT Wijaya Karya dan PT SAC Nusantara KSO
    Nilai kontrak: Rp 405 miliar
  - Pluit (2014): 75 meter
- **Pemerintah DKI**
  - Kali Blencong: Tahap finishing dan rampung tiga pintu air
    Anggaran: Rp 10 miliar
  - Pasar Ikan: Rampung 100 persen
  - Kamal Muara: 50 persen (300 meter dari 750 meter)
    Anggaran: Rp 49 miliar

INGE KLARA SAFITRI | BERBAGAI SUMBER

Judul	**Cilacap Wakili Kota Tangguh Bencana RI**	Tanggal	Jumat, 25 Januari 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 18)		
Resume	Mitigasi dibuat untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak bencana. Tujuan tersebut harus diimbangi dengan sumber daya yang sepadan.		

Cilacap Wakili Kota Tangguh Bencana RI

Mitigasi dibuat untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak bencana. Tujuan tersebut harus diimbangi dengan sumber daya yang sepadan.

Liliek Dharmawan
lilik@mediaindonesia.com

KABUPATEN Cilacap, Jawa Tengah, dikenal sebagai 'supermarket'-nya bencana. Hampir seluruh bencana pernah dan berpotensi terjadi lagi di daerah itu, seperti tsunami, gempa, banjir, tanah longsor, tanah bergerak, angin kencang, dan gelombang pasang. Hanya erupsi gunung yang tidak mungkin terjadi karena di Cilacap memang tidak ada gunung berapi.

"Sebagai kota yang paling rawan potensi bencananya di Jateng, Cilacap terus berbenah untuk melakukan upaya antisipasi dan mitigasi. Cilacap terus mempersiapkan masyarakatnya untuk tangguh dalam menghadapi bencana. Selain itu, Cilacap mempersiapkan berbagai peralatan peringatan dini ataupun lokasi-lokasi evakuasi," ujar Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap Tri Komara Sidhy, kemarin.

Berbagai upaya tersebut membuat Cilacap dipilih United Nations Office fot Disaster Risk Reduction (UNISDR) menjadi wakil Indonesia sebagai kota tangguh bencana dalam acara Global Final Wrap-up Workshop on Making City Risilence di Incheon, Korea Selatan, pada Maret mendatang.

Tri mengungkapkan sebelumnya, UNISDR bersama BNPB menyelenggarakan *workshop* tentang apa dan bagaimana mempersiapkan masyarakat serta berbagai upaya dalam mitigasi bencana di Cilacap. Dari sini, Cilacap dinilai sebagai kota tangguh bencana dan pantas mewakili RI ke Korsel.

"Di Korsel, kita kembali akan memaparkan bagaimana Cilacap menghadapi bencana. Kami telah memiliki pengalaman," ujarnya.

Di sisi lain, Pemprov Riau menyatakan kesiapan menghadapi ancaman bencana tahunan kebakaran hutan dan lahan (kahutla) serta banjir tahun ini. Kepala BPBD Riau Edwar Sanger menegaskan dalam tiga tahun belakangan ini Riau bebas dari karhutla. Hal itu berkat koordinasi yang terjalin semakin baik antarinstansi terkait.

"Alhamdulillah koordinasi semakin baik antarinstansi terkait dengan BPBD kabupaten dan kota. Insya Allah semua bisa berjalan dengan baik," ungkap Edwar.

Bencana hidrometeorologi

Puncak musim hujan diprediksi awal Februari mendatang. Masyarakat diminta mewaspadainya, khususnya bencana hidrometeorologi, seperti tanah longsor, angin kencang, dan banjir. Saat ini pun di beberapa daerah sudah terjadi bencana itu.

Kepala Pelaksana BPBD DI Yogyakarta Biwara Yuswantana mengatakan untuk mengantisipasi bencana tanah longsor, kapasitas masyarakat lokal yang tinggal di lokasi rawan bencana menjadi kunci minimalisasi dampak. "Mereka harus paham tanda-tanda itu, misalnya arus air dari bukit mulai keruh atau membawa material tanah, tanah mulai bergerak, pohon miring, dan sebagainya. Mereka harus bisa memutuskan evaluasi mandiri."

Pemkab Sukabumi, Jawa Barat, pun menginstruksikan seluruh kecamatan dan desa meningkatkan kesiapsiagaan bencana. "Kami sudah menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor sejak November 2018. Ini upaya menghadapi berbagai potensi bencana saat kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang," tegas Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, kemarin.

Sementara itu, ribuan nelayan di pantura Jateng berhenti melaut. Pelayaran penyeberangan pun bisa dihentikan menyusul peringatan gelombang tinggi 1,25 -4 meter di Laut Jawa pada 24-27 Januari 2019 dari Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Tanjung Mas, Semarang.

Di Bali, angin kencang merobohkan puluhan pohon di Kota Denpasar. Beruntung tidak ada korban jiwa. BPBD Kota Denpasar mengimbau warga mewaspadai cuaca ekstrem saat ini.

Cuaca buruk juga membuat PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang, NTT, menutup sementara sejumlah rute pelayaran mulai kemarin. General Manager PT ASDP Indonesia Cabang Kupang Burhan Zahim mengatakan hanya dua rute pelayaran yang beroperasi pada Kamis pagi yakni Kupang-Rote (pp) dan Kalabahi-Kupang (pp).

Sebaliknya, aktivitas pelayaran di Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang, Provinsi Babel, kembali normal setelah selasa kemarin seluruh kapal dilarang berlayar karena cuaca ekstrem. (RK/AT/BB/AS/OL/RF/N-3)

Judul	**Optimalkan Infrastruktur**	Tanggal	Jumat, 25 Januari 2019
Media	Kompas (Halaman, 14)		
Resume	Selama kurun 2016-2018, sebanyak 62 proyek strategis nasional senilai Rp 320 triliun telah selesai. Keberadaanya mesti dimanfaatkan secara optimal.		

Optimalkan Infrastruktur

Selama kurun 2016-2018, sebanyak 62 proyek strategis nasional senilai Rp 320 triliun telah selesai. Keberadaannya mesti dimanfaatkan secara optimal.

JAKARTA, KOMPAS — Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas mencatat, sepanjang tahun lalu ada 32 proyek strategis nasional yang telah selesai. Jumlah itu menambah 20 PSN yang selesai pada 2016 dan 10 PSN yang selesai pada 2017.

Direktur Penelitian Core Indonesia Mohammad Faisal, di Jakarta, Kamis (24/1/2019), mengatakan, setelah infrastruktur selesai dibangun, perlu langkah lanjutan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Jalan Tol Trans-Jawa yang tersambung dari Merak sampai Pasuruan, misalnya, mempercepat waktu tempuh kendaraan serta berpeluang mengembangkan kawasan industri atau destinasi wisata.

Selain pengembangan tempat istirahat (*rest area*), jalan tol idealnya terhubung dengan potensi ekonomi daerah, seperti pusat batik. "Jadi, infrastruktur mesti terkoneksi dengan pusat ekonomi daerah atau mengembangkan pusat pertumbuhan baru. Karena itu, baik kementerian maupun pemerintah daerah mesti duduk bersama untuk menyamakan persepsi terkait potensi yang hendak dikembangkan," kata Faisal.

Meski infrastruktur di luar Jawa belum seandal di Jawa, kata Faisal, pusat-pusat industri baru sudah mulai dibangun. Potensi sumber daya alam atau bahan mentah serta tingkat upah yang kompetitif mesti dipandang sebagai peluang untuk mengembangkan industri setempat.

Luar Jawa

Di Kalimantan, misalnya, industri berbasis sumber daya alam setempat bisa dikembangkan di dekat infrastruktur pos lintas batas negara (PLBN) yang sudah selesai dibangun. Kedekatan dengan negara tetangga bisa menjadi peluang untuk mengekspor produk-produk lokal. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk hilirisasi industri.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, yang juga Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Sanny Iskandar mengatakan, pengembangan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus idealnya didukung jalan tol. Dengan demikian, arus keluar masuk kawasan lebih steril dan langsung terhubung dengan infrastruktur lain seperti pelabuhan.

Arah pengembangan kawasan industri, kata Sanny, akan semakin keluar dari Jawa. Jika beberapa tahun lalu 75 persen industri ada di Jawa, kini sudah berkurang menjadi sekitar 65 persen, sementara 35 persen di luar Jawa. Kedekatan dengan bahan baku serta semakin baiknya infrastruktur menjadi pendorong. Apalagi regulasi mengharuskannya.

Koridor Jalan Tol Trans-Sumatera juga berpotensi untuk pengembangan kawasan industri. Di Lampung, misalnya, kini tengah dikembangkan kawasan industri. "Didorong ke luar Jawa karena ada banyak sumber daya dan bahan mentah berorientasi ekspor," kata Sanny.

(NAD)

Judul	**Kawasan Industri Makin Menyebar**	Tanggal	Jumat, 25 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Pengoperasian jalan tol Trans – Jawa dari Merak, Banten sampai dengan Grati, Jawa Timur dinilai bakal memicu penyebaran kawasan industri dan tidak lagi terfokus di Jawa bagian Barat.		

▸ JALAN TOL TRANS-JAWA

Kawasan Industri Makin Menyebar

JAKARTA — Pengoperasian jalan tol Trans-Jawa dari Merak, Banten sampai dengan Grati, Jawa Timur dinilai bakal memicu penyebaran kawasan industri dan tidak lagi terfokus di Jawa bagian barat.

Riviki Maulana
riviki.maulana@bisnis.com

▸ **Di Kabupaten Ngawi dan Nganjuk, pemkab memproses izin kawasan industri seluas 400 hektare.**

▸ **Kesiapan pemda dalam menarik investasi, seperti kemudahan perizinan, diperlukan.**

Kehadiran jalan tol juga menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menarik investor guna menggerakkan laju perekonomian di daerahnya.

Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa jalan tol Trans-Jawa kini sudah terbentang 933 kilometer dari Merak hingga Grati, Pasuruan.

Dalam 4 tahun terakhir (2015—2018), panjang jalan tol Trans-Jawa yang diselesaikan mencapai 616 kilometer.

Secara keseluruhan, panjang jalan tol yang baru beroperasi pada periode yang sama mencapai 782 kilometer.

Basuki menerangkan bahwa keberadaan jalan tol turut merangsang kemunculan kawasan industri baru.

Dia mencatat di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Nganjuk, pemerintah daerah setempat tengah memproses izin kawasan industri seluas 400 hektare.

"Dengan adanya jalan tol, kawasan industri akan tersebar. Vendor-vendor, misalnya, nanti tidak harus ada di Karawang untuk suplai pabrik-pabrik yang ada di sana," katanya, Selasa (24/1).

Sejak 2015 hingga 2019, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan tol baru sepanjang 1.852 kilometer. Selain itu, kementerian membangun jalan nasional baru sepanjang 2.650 kilometer dan 500 kilometer jalan akses menuju 24 pelabuhan utama, 60 pelabuhan penyeberangan, dan 25 kawasan strategis pariwisata nasional.

Menurutnya, pembangunan jalan baru dapat menurunkan waktu tempuh di jalur logistik utama dari 2,7 jam per 100 kilometer menjadi 2,2 jam per 100 kilometer.

Selain itu, jalan baru diproyeksi bisa memangkas rasio biaya logistik terhadap PDB dari 24% menjadi 20%.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan, dinamika kawasan industri tak lepas dari operasional jalan tol.

Dia memberi contoh kawasan industri di Merak—Tangerang dan Bekasi—Karawang—Purwakarta tumbuh berkat keberadaan jalan tol.

Kawasan ekonomi baru, termasuk kawasan industri dan pariwisata baru, bakal bermunculan seiring dengan operasional jalan tol. Namun, hal itu akan bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menarik investasi, seperti kemudahan perizinan dan dukungan jalan akses.

Menurut Sanny, beberapa daerah yang berpotensi menjadi kawasan ekonomi baru a.l Subang, Majalengka, Indramayu, dan Cirebon di Jawa Barat.

Selain itu, daerah pantai utara mulai dari Brebes hingga Semarang mempunyai potensi serupa.

Di Jawa Timur, wilayah Nganjuk dan Ngawi bakal menyusul kawasan ekonomi yang sudah mapan seperti Surabaya dan Sidoarjo.

LEBIH SELEKTIF

Kendati demikian, Sanny yang juga menjabat Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia menyebutkan, kalangan pengusaha bakal selektif dalam mengembangkan kawasan industri baru.

Dia menekankan, pengembangan kawasan diupayakan tidak berada di lahan-lahan produktif.

"Ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus merespons dengan memberi layanan yang baik dan jangan mengeluarkan peraturan yang kontraproduktif." tuturnya kepada *Bisnis*, Kamis (24/1).

Sanny mengakui keberadaan jalan tol bakal turut meningkatkan efisiensi, terutama dari penurunan biaya logistik. Namun, kawasan industri juga membutuhkan sumber energi yang terjangkau.

Oleh karena itu, pengusaha berharap agar harga gas industri bisa lebih terjangkau sehingga membantu peningkatan daya saing hasil produksi.

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai perubahan lanskap infrastruktur secara langsung turut mengubah wajah industri logistik.

Ketua ALI Zaldy Ilham Masita mengatakan bahwa jalan tol Trans-Jawa bakal memicu pergeseran kawasan pergudangan sejalan dengan peralihan kawasan industri.

Menurutnya, para pelaku usaha di beberapa sektor industri sudah melakukan hijrah dari kawasan industri di Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Jawa Timur karena tingkat upahnya lebih rendah.

"Saya rasa trennya bukan industri menyebar, melainkan berpindah karena industri Indonesia stagnan. Industri akan selalu mencari lokasi yang murah biaya SDM [sumber daya manusia]-nya dan murah biaya logistiknya," katanya kepada *Bisnis*.

Sumber: berbagai sumber, diolah

Bisnis/Erlangga Adjisurya/Husin Parapat

EFEK BERGANDA DARI KEHADIRAN JALAN TOL

Keberadaan jalan tol Trans-Jawa tak hanya memudahkan perqerakan manusia dari barat ke timur Pulau Jawa. Berbagai sektor juga ikut terdongkrak dengan keberadaan jalan bebas hambatan. Kawasan industri, menjadi salah satu sektor yang akan merasakan dampak positif dari keberadaan jalan tol Trans-Jawa.

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Jumat, 25 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Rencana Tol Semarang-Demak.		

▶ RENCANA TOL SEMARANG—DEMAK

Bisnis/Triawanda Tirta Aditya

Sejumlah kendaraan melintasi ruas tol Trans-Jateng di Semarang, Jawa Tengah, Kamis(24/1). Proyek pembangunan jalan tol Semarang—Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut untuk mengatasi banjir dan rob di wilayah pantai utara hingga saat ini masih menunggu proses lelang.

Judul	**Groundbreaking Ditargetkan Maret**	Tanggal	Jumat, 25 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	PDAM Tirta Moedal menargetkan peletakan batu pertama proyek Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat pada Maret 2019		

Groundbreaking Ditargetkan Maret

SEMARANG — PDAM Tirta Moedal menargetkan peletakan batu pertama proyek Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat pada Maret 2019.

Sejumlah perizinan yang masih dalam proses dijanjikan selesai bulan depan.

Pejabat sementara Direktur Utama PDAM Tirta Moedal M. Farchan mengatakan bahwa perizinan yang tengah dalam proses terkait dengan proyek tersebut antara lain izin mendirikan bangunan reservoir seperti di Bambankerep, Manyaran, dan Desel.

Izin lainnya yang juga masih dalam proses adalah izin pemasangan pipa yang melintas di jalan tol dan di jalan nasional.

"Saya menargetkan Maret [peletakan batu pertama/*groundbreaking*]," kata Farchan kepada *Bisnis*, Rabu (24/1).

Dalam proyek tersebut, akan ada pipa yang dipasang di jalan tol Semarang—Batang untuk jaringan distribusi utama di tiga lokasi, yakni Beringin, Wahyu Utama, dan Candi Intan. Sementara itu, di jalan tol Krapyak, pemasangan pipa akan dilakukan di jembatan tol Panjangan.

Pemasangan pipa yang berada di jalan nasional akan dilaksanakan dari Jalan Siliwangi sampai dengan Mangkang.

Menurut Farchan, berbagai perizinan yang belum keluar terkait dengan proyek SPAM Semarang Barat dijanjikan dapat selesai pada Februari tahun ini.

Adapun, pengerjaan proyek tersebut akan memakan waktu selama 2 tahun.

TANTANGAN

Perizinan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan proyek SPAM selama ini.

Selain itu, pembebasan lahan juga merupakan tantangan meskipun menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang.

"Urusan pemkot [pembebasan lahan proyek] walau masih ada yang belum *clear*," kata Farchan.

Data dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebutkan bahwa nilai investasi proyek SPAM Semarang Barat sekitar Rp1 triliun.

Proyek tersebut merupakan proyek percontohan SPAM dengan skema pendanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Keberadaan SPAM Semarang Barat juga akan menyelesaikan permasalahan krisis air bersih dan penurunan permukaan tanah karena penggunaan air tanah di Kota Semarang.

Proyek ini akan menggunakan air dari Bendungan Jatibarang untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya penyediaan air baku Kota Semarang yang selama ini mengandalkan penyediaan dari Kabupaten Kudus.

Pemenang lelang proyek SPAM Semarang Barat adalah PT Aetra Air Jakarta–PT Medco Gas Indonesia pada 12 September 2018. Kemudian, pada 9 Oktober 2018 juga telah dilaksanakan penandatanganan *head of agreement* proyek.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, konsorsium PT Aetra Air Jakarta–PT Medco Gas Indonesia ditetapkan sebagai pemenang dalam lelang proyek pembangunan SPAM dengan nilai penawaran terendah dibandingkan dengan kompetitor mereka dengan harga penawaran yakni Rp417,28 miliar.

Konsorsium Aetra-Medco membentuk badan usaha pelaksana proyek SPAM Semarang Barat, yakni PT Air Semarang Barat. *(Yudi Supriyanto)*

Judul	**WFF Tawarkan Skema Pembiayaan**	Tanggal	Jumat, 25 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Lembaga keuangan berbasis di Amsterdam, belanda, The Water Finance Facility menawarkan skema pendanaan baru untuk membiayai proyek-proyek air minum di Indonesia.		

WFF Tawarkan Skema Pembiayaan

JAKARTA — Lembaga keuangan berbasis di Amsterdam, Belanda, The Water Finance Facility menawarkan skema pendanaan baru untuk membiayai proyek-proyek air minum di Indonesia.

Skema yang mengandalkan pendanaan dari investor lokal ini diestimasi bisa memenuhi 10% dari kebutuhan investasi di sektor air minum.

Perwakilan WFF Marteen Blockland mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi yang besar. Namun, kapasitas pendanaan di banyak negara terbatas sehingga tidak mampu menutupi kebutuhan pendanaan untuk proyek air minum.

Untuk itu, WFF berencana membentuk lembaga yang bisa menghimpun dana swasta, terutama dana pensiun dan asuransi untuk membiayai proyek air minum.

Saat ini, WFF telah membentuk Kenya Pooled Water Fund (KPWF) dan entitas ini telah mendapat izin untuk menerbitkan surat utang (obligasi) untuk mendanai tiga proyek air minum di Kenya. Penerbitan surat utang ini direncanakan berlangsung pada tahun ini. Lewat pendanaan dari surat utang, pelayanan baru air minum diestimasi mencakup 400.000 jiwa.

"Skema *pooled fund* ini diperkirakan dapat menutup 10% *gap* pendanaan yang dibutuhkan," ujar Marteen dalam kunjungan ke Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Selasa (22/1).

Di Indonesia, kebutuhan investasi untuk memenuhi akses air minum 100% mencapai Rp253,8 triliun. Dari jumlah itu, APBN hanya bisa memenuhi 26%. Sisa kebutuhan pendanaan diharapkan dari APBD dan swasta, masing-masing sebesar 47% dan 27%.

Anggota Unsur Profesi BPPSPAM Poppy Indrawati Janto menyebutkan bahwa skema pendanaan alternatif yang digagas WFF sangat menarik, tetapi mengandung risiko karena tidak semua perusahaan air minum di Indonesia memilki keuangan yang solid.

"BPPSPAM menyarankan PDAM memanfaatkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh tiap-tiap PDAM," jelasnya kepada *Bisnis*, Kamis (24/1).

(Rivki Maulana)

Judul	**Jabar Percepat Tol Japek Selatan**	Tanggal	Jumat, 25 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya percepatan pembangunan proyek jalan tol Japek Selatan dengan menuntaskan permasalahan penting		

Jabar Percepat Tol Japek Selatan

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya percepatan pembangunan proyek jalan tol Japek Selatan, dengan menuntaskan permasalahan penting.

redaksi@bisnis.com

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan bahwa percepatan pembangunan tol sepanjang 64 kilometer tersebut setelah menggelar rapat bersama Direktur Utama PT Jasa Marga Japek Selatan (JJS) Dedi Krisnariawan Sunoto.

"Pembangunan ditargetkan mulai Februari. Pemerintah provinsi membantu sepenuhnya," ujarnya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (24/1).

Paling tidak, percepatan tersebut terkait dengan empat hal yang diperlukan PT JJS, *pertama*, soal penyelesaian analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal). Posisi dokumen yang diajukan PT JJS sudah diplenokan Dinas Lingkungan Hidup Jabar. "Tinggal teknis penyelesaian beberapa hal persoalan signifikan terkait penyelesaian Amdal," ujarnya.

Kedua, rencana PT JJS melakukan pinjam pakai lahan PT Perhutani sekitar 110 hektare yang berada di enam desa di tiga kecamatan Purwakarta. Guna memproses ini, Badan Usaha Jalan Tol tersebut harus mengantongi rekomendasi Gubernur Jabar.

> **Tol Japek Selatan akan memiliki akses yang nantinya tersambung langsung dengan jaringan tol Cikopo-Palimanan dan tol akses Pelabuhan Patimban, Subang.**

"Kepala Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan Perhutani serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang dalam proses," tuturnya.

Ketiga, pembangunan fisik ruas yang membentang dari Sadang, Purwakarta-Jati Asih, Bekasi dan melintasi Sungai Cisadane dan Citarum yang memerlukan izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cisadane dan BBWS Citarum.

Meski tidak membutuhkan rekomendasi gubernur, dalam prosesnya diperlukan rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan untuk dilanjutkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jabar.

Keempat, pemprov sudah meminta BPN Kanwil Jabar untuk segera mendelegasikan pada BPN di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi untuk segera memproses pengadaan lahan. Delegasi ini dilakukan mengingat Pemprov Jabar sudah mengeluarkan penetapan lokasi (Penlok) Japek Selatan November 2018 lalu. "Penlok sudah selesai, saya sudah telepon Kepala Kanwil BPN," paparnya.

Iwa berharap agar dengan upaya percepatan itu seluruhnya bisa tuntas pada Februari 2019, dengan proses pembebasan lahan serta konstruksi bisa dilakukan secara paralel. Menurutnya, seluruh pihak dipastikan akan membantu penyelesaian dokumen teknis tersebut karena Japek Selatan sudah masuk proyek strategis nasional. "Jadi empat hal itu yang signifikan," tegasnya.

Iwa Karniwa juga memastikan, tol Japek Selatan akan memiliki akses yang nantinya tersambung langsung dengan jaringan tol Cikopo-Palimanan dan tol akses Pelabuhan Patimban, Subang. "Ini nanti akan memudahkan konsentrasi konektivitas yang semakin baik antara arus barang dan orang," ujarnya.

PERSIAPAN KONSTRUKSI

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT JJS Dedi Krisnariawan Sunoto mengatakan Februari ini pihaknya sudah mempersiapkan konstruksi untuk pengerjaan Japek Selatan Paket III Sadang-Taman Mekar, Karawang sepanjang hampir 28 kilometer. Pada Januari 2019 pihaknya segera menetapkan kontraktor, konsultan pengendali mutu independen. "Lelang juga sudah jalan, tahap akhir," ungkapnya.

Konstruksi di paket III dilakukan lebih awal mengingat Jasa Marga sudah memiliki lahan milik Jasa Marga di ruas Tol Cipularang seluas hampir 40 hektare. Jika proses pengadaan tanah sudah bisa berjalan oleh BPN setempat, JJS juga sudah menyediakan anggaran besar untuk pembebasan yang dibutuhkan sekitar 700 hektare. "Dana talangan kami siapkan untuk pembebasan hingga [Kecamatan] Setu [Bekasi]," ujarnya.

Menurutnya, dana talangan yang dimiliki BUJT berasal dari PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia. Setiap bank menyediakan dana talangan lebih dari Rp1,38 triliun.

"Kami talangi dari dana badan usaha, sebesar Rp4,6l triliun, sudah siap."

Untuk lahan Perhutani, pihaknya sudah berkoordinasi terkait dengan upaya pinjam pakai untuk melakukan pematokan lahan. "Kalau itu sudah keluar tinggal ke kementerian," katanya. (ASY)

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Jumat, 25 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Kondisi Bendungan Bili-Bili		

KONDISI BENDUNGAN BILI-BILI

Bisnis/Paulus Tandi Bone

Bendungan Bili-Bili di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan diabadikan dari udara, Kamis (24/1). Hingga pukul 14.20 wita volume air waduk sekitar 258.28 m^3 per detik adapun *inflow* sekitar 144.99 m^3 per detik dan *outflow* sekitar 145.00 m^3 per detik. Tingginya curah hujan beberapa hari terakhir membuat pintu air di bendungan tersebut dibuka dan mengakibatkan beberapa pemukiman di bantaran Sungai Jeneberang terendam air.